

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatra. Secara administratif, Kota Bengkulu terdiri atas 9 kecamatan dan 67 kelurahan dengan luas wilayah sekitar 151,70 km².⁴⁷ Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa di Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi Kota Bengkulu yang cukup pesat berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi. Kendaraan bermotor menjadi salah satu alat transportasi utama yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari,⁴⁸ baik dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bengkulu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, h. 91

2 Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu Dalam Angka 2025*, h. 112.

Oleh karena itu, sektor perpajakan kendaraan bermotor menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah serta pembiayaan berbagai program pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 3.1
Jumlah Kendaraan Bermotor di
Kota Bengkulu Tahun 2025

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan
Sepeda Motor	285.000 Unit
Mobil Penumpang	38.000 Unit
Mobil Barang	12.500 Unit
Bus	1.500 Unit
Jumlah	337.000 Unit

Sumber: Data SAMSAT Kota Bengkulu Tahun 2025.⁴⁹

Data tersebut menunjukkan bahwa sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak dimiliki masyarakat Kota Bengkulu. Tingginya jumlah kendaraan bermotor tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besarnya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu.

B. Profil SAMSAT Kota Bengkulu

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kota Bengkulu merupakan lembaga pelayanan publik yang menyelenggarakan pelayanan administrasi kendaraan bermotor melalui kerja sama antara Kepolisian Negara

3 SAMSAT Kota Bengkulu, *Data Registrasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025* (Bengkulu: SAMSAT Kota Bengkulu, 2025),h.86

Republik Indonesia, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, dan PT Jasa Raharja.⁵⁰ SAMSAT Kota Bengkulu memiliki tugas memberikan pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta berbagai pelayanan administrasi kendaraan lainnya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, SAMSAT Kota Bengkulu juga melaksanakan pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Pelaksanaan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan penerimaan daerah serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota. Selain melakukan pelayanan perpajakan, SAMSAT Kota Bengkulu juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelayanan publik.⁵¹

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor,h.67

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.h.87

C. Data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bengkulu

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan daerah Provinsi Bengkulu.⁵² Besarnya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat menjadikan sektor ini sebagai sumber penerimaan yang strategis bagi pemerintah daerah.

Tabel 3.2
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bengkulu

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB
2023	Rp85 Miliar	Rp82 Miliar
2024	Rp90 Miliar	Rp88 Miliar
2025	Rp95 Miliar	Rp93 Miliar

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025.⁵³

Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu relatif meningkat sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

6 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, *Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025* (Bengkulu: Bapenda Provinsi Bengkulu, 2025), h. 23.

7 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, *Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025*, h. 24.

D. Data Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan perpajakan yang mulai diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁵⁴ Melalui kebijakan ini, pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat karena dianggap menyebabkan bertambahnya beban pajak yang harus dibayarkan.

Tabel 3.3
Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bengkulu Tahun 2025

Uraian	Nilai
Target Opsen PKB	Rp18 Miliar
Realisasi Opsen PKB	Rp16,7 Miliar
Persentase Capaian	92,7%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025.⁵⁵

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, h.73

9 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, *Laporan Penerimaan Opsen PKB Tahun 2025* (Bengkulu: Bapenda Provinsi Bengkulu, 2025), h.11

Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah Kota Bengkulu. Oleh karena itu, pemerintah daerah menjadikan kebijakan opsen pajak sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Tabel 3.4
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu
Tahun 2025

Sumber PAD	Target
Pajak Daerah	Rp210 Miliar
Retribusi Daerah	Rp45 Miliar
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp12 Miliar
Lain-lain PAD yang Sah	Rp33 Miliar
Total PAD	Rp300 Miliar

Sumber: Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2025.⁵⁶

Berdasarkan data tersebut, sektor pajak daerah menjadi penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu. Penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu.

10 Pemerintah Kota Bengkulu, *Dokumen APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025* (Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu, 2025), h. 37

E. Kondisi Geografis

Bengkulu memiliki kondisi geografis yang cukup strategis karena terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Kota ini berada pada wilayah dataran rendah dengan sebagian besar permukaan tanah relatif datar sehingga mendukung perkembangan permukiman, perdagangan, dan aktivitas pemerintahan. Luas wilayah Kota Bengkulu sekitar 151,7 km² dengan kondisi iklim tropis yang memiliki curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun.

Secara geografis, Kota Bengkulu berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah di sebelah utara dan timur, Kabupaten Seluma di sebelah selatan, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Letak tersebut menjadikan Kota Bengkulu memiliki garis pantai yang panjang dan potensi besar di bidang kelautan, perikanan, dan pariwisata pantai. Salah satu kawasan pantai yang terkenal adalah Pantai Panjang yang menjadi daya tarik wisata utama di kota tersebut.

Kondisi alam Kota Bengkulu juga dipengaruhi oleh keberadaan sungai-sungai kecil dan kawasan rawa di beberapa wilayah. Selain itu, kota ini memiliki suhu udara yang relatif panas dan lembap dengan rata-rata suhu berkisar antara 23°C hingga 32°C. Curah hujan yang tinggi menyebabkan beberapa wilayah rawan mengalami genangan air atau banjir pada musim penghujan.

Keadaan geografis Kota Bengkulu memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir umumnya bekerja di sektor perikanan dan perdagangan, sedangkan masyarakat di wilayah perkotaan banyak bergerak di bidang jasa, pendidikan, dan usaha perdagangan. Dengan kondisi geografis tersebut, Kota Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang dalam sektor ekonomi maritim, pariwisata, dan pembangunan wilayah pesisir.

F. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat di Bengkulu dipengaruhi oleh perkembangan sektor perdagangan, jasa, perikanan, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu, kota ini menjadi pusat aktivitas ekonomi sehingga banyak masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan perdagangan dan jasa. Sebagian masyarakat bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil yang tersebar di berbagai wilayah kota.⁵⁷

Perkembangan UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat membuka usaha di bidang kuliner, kerajinan,

11 Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu dalam Angka 2025* (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2025), h. 155–175.

perdagangan kecil, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, letak geografis Kota Bengkulu yang berada di wilayah pesisir juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sektor perikanan dan hasil laut. Keberadaan pasar tradisional dan pusat perdagangan turut membantu perputaran ekonomi masyarakat setiap harinya.

Namun demikian, kondisi ekonomi masyarakat Kota Bengkulu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan pendapatan masyarakat yang belum merata. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat kenaikan biaya hidup. Kondisi tersebut semakin dirasakan ketika terdapat kebijakan yang menambah pengeluaran masyarakat, seperti kenaikan pajak kendaraan bermotor akibat penerapan opsen pajak.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pemberian bantuan sosial, dan peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, diharapkan kondisi ekonomi masyarakat Kota Bengkulu dapat terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

G. Sistem Pajak Daerah

Sistem pajak daerah di Bengkulu merupakan mekanisme pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pelaksanaan sistem pajak daerah di Kota Bengkulu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta peraturan daerah yang berlaku. Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat⁵⁸.

Dalam pelaksanaannya, sistem pajak daerah di Kota Bengkulu dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama instansi terkait, termasuk SAMSAT untuk pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak daerah di Kota Bengkulu terdiri atas beberapa jenis, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, serta

12 Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

pajak kendaraan bermotor yang dipungut melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan SAMSAT.

Salah satu bentuk penerapan sistem pajak daerah yang cukup diperhatikan masyarakat adalah penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Melalui kebijakan opsen pajak, sebagian penerimaan pajak kendaraan langsung menjadi hak pemerintah kabupaten/kota sehingga Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh tambahan pendapatan daerah secara langsung. Sistem ini menggantikan mekanisme bagi hasil pajak sebelumnya dan bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pembayaran pajak daerah di Kota Bengkulu dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung di kantor pelayanan maupun melalui sistem pembayaran elektronik dan layanan digital. Pemerintah daerah juga terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dengan mempermudah proses pembayaran, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan berbagai program keringanan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sistem pajak daerah di Kota Bengkulu memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, maka semakin besar pula penerimaan

daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan jalan, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bengkulu.

H. Implementasi Opsen Pajak

Implementasi opsen pajak di Bengkulu mulai diterapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini diterapkan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, opsen pajak dipungut bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pelayanan SAMSAT.⁵⁹

Implementasi opsen pajak di Kota Bengkulu dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu, dan pihak SAMSAT. Pada sistem baru ini, sebagian penerimaan PKB dan BBNKB langsung

13 Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, khususnya ketentuan mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

menjadi hak pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme opsen. Sebelumnya, pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian pajak kendaraan melalui sistem bagi hasil dari pemerintah provinsi. Dengan adanya opsen pajak, distribusi penerimaan pajak menjadi lebih langsung dan transparan.

Dalam praktiknya, masyarakat yang membayar pajak kendaraan di SAMSAT Kota Bengkulu akan melihat tambahan komponen pembayaran berupa opsen PKB atau opsen BBNKB pada lembar rincian pajak kendaraan. Besaran tarif opsen ditetapkan sebesar persentase tertentu dari pokok pajak kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pemerintah menjelaskan bahwa opsen merupakan perubahan mekanisme pembagian pajak daerah, sebagian masyarakat tetap merasakan adanya peningkatan nominal pembayaran pajak kendaraan.

Pelaksanaan opsen pajak di Kota Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Hasil penerimaan opsen pajak diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat

kemampuan fiskal pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.⁶⁰

Namun, implementasi opsen pajak juga menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem opsen dan adanya anggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan kenaikan pajak kendaraan secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pihak SAMSAT terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaat opsen pajak agar masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, implementasi opsen pajak di Kota Bengkulu merupakan bagian dari reformasi sistem pajak daerah yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan pelaksanaan yang baik, transparan, dan didukung oleh sosialisasi yang maksimal, kebijakan opsen pajak diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu.

14 Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4*, Penjelasan Umum, h. 128–131.